

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian dapat berhasil baik atau tidak baik tergantung dari data yang diperoleh. Kualitas suatu penelitian didukung pula oleh proses pengolahan yang dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian agar diperoleh data dan kualitas pengolahan yang baik. Dalam bab III penulis akan memaparkan secara rinci mengenai metode yang peneliti gunakan di dalam menyusun skripsi ini, dari mulai persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pada tahapan penganalisisan data.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara alamiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul – betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Peneliti menggunakan metode historis pada saat menyusun skripsi ini. Metode historis merupakan suatu metode yang lazim dipergunakan dalam penelitian sejarah, di mana dilakukan pengkajian, penjelasan, dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman (dokumen) serta peninggalan masa lampau (Sjamsudin, 2007 : 17 – 19). Begitu pula dengan penjelasan Louis Gottschalk (1982: 32) metode historis merupakan suatu proses pengkajian, penjelasan dan menganalisis secara kritis rekaman serta peninggalan masa lalu. Metode historis digunakan karena data – data yang digunakan hanya dapat diperoleh melalui studi literatur. Data studi literature ini penulis peroleh dari buku, jurnal, artikel di dalam majalah dan surat kabar yang sesuai dengan kajian yaitu mengenai kebijakan

apartheid yang berlaku di Republik Afrika Selatan pada masa pemerintahan Frederik Willem de Klerk pada tahun 1989 – 1994.

Langkah – langkah yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memilih topik yang sesuai. Penulis memilih topik penelitian yang berhasil menarik minat dan layak untuk dipublikasikan. Penulis memilih topik mengenai kontroversi kebijakan *apartheid* yang berlaku di Republik Afrika Selatan pada masa pemerintahan Frederik Willem de Klerk tahun 1989 – 1994 karena ingin mengetahui realisasi kebijakan tersebut sampai pada tahapan penghapusan kebijakan yang rasial ini.
2. Mengusut semua bukti yang sesuai dengan topik yang dipilih. Penulis mencari semua bukti atau sumber yang dianggap sesuai dengan permasalahan mengenai kenijakan *apartheid*. Penulis melakukan pencarian semua sumber tertulis, baik buku, jurnal dan artikel di dalam surat kabar mengenai kebijakan *apartheid* dan kondisi sosial dan politik di Republik Afrika Selatan pada masa pemerintahan Frederik Willem de Klerk tahun 1989 – 1994.
3. Membuat catatan penting dan sesuai dengan topik ketika penelitan sedang dilakukan. Penulis mencatat hal – hal penting dan sesuai dengan topik skripsi yang terdapat pada semua sumber yaitu mengenai kebijakan *apartheid* dan kondisi sosial dan politik di Republik Afrika Selatan pada masa pemerintahan Frederik Willem de Klerk tahun 1989 – 1994.
4. Mengevaluasi semua bukti yang telah terkumpulkan. Penulis memilih bukti yang kuat dan sesuai dari semua sumber yang didapatkan mengenai kebijakan *apartheid* dan kondisi sosial dan politik di Republik Afrika Selatan pada masa pemerintahan Frederik Willem de Klerk tahun 1989 – 1994.
5. Menyusun hasil – hasil penelitian ke dalam sistematika yang telah dipersiapkan sebelumnya.
6. Menyajikan hasil penelitian tersebut secara menarik dan mudah dimengerti (Sjamsudin, 2007: 89 – 90).

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan pada skripsi ini adalah teknik kajian literatur. Studi literatur dilakukan dengan membaca kemudian mengkaji semua sumber tertulis yang sesuai dengan permasalahan. Penulis mencari fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Republik Afrika Selatan, khususnya masyarakat pribumi kulit hitam yang menjadi objek direalisasikannya kebijakan *apartheid*. Hal ini penulis lakukan sehubungan dengan keterbatasan waktu, sumber dan biaya yang penulis miliki.

3.1 Persiapan Penelitian

3.1.1 Penentuan dan Pengajuan Topik Penelitian

Tahap penentuan dan pengajuan topik merupakan awal dari kegiatan penelitian. Penulis mengajukan judul penelitian kepada pihak Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS) agar bisa diketahui apakah judul yang diajukan sudah ada yang meneliti sebelumnya atau belum. Setelah judul disetujui dan diberikan SK pengantar untuk dosen pembimbing, penulis menyusun rancangan penelitian yang selanjutnya harus dipresentasikan di dalam seminar proposal untuk menentukan, mengarahkan, dan memberi masukan terhadap judul dan rancangan penelitian yang diajukan oleh penulis. Tahap selanjutnya, rancangan penelitian ini diperbaiki sesuai dengan masukan dosen pembimbing dan dosen lainnya yang ikut memberikan masukan pada saat seminar, kemudian judul serta rancangan disetujui dan disahkan oleh pihak TPPS, maka penulis sudah bisa melakukan penelitian terhadap kajian yang dipilih oleh penulis.

3.1.2 Konsultasi

Konsultasi merupakan proses bimbingan yang dilakukan oleh peneliti kepada dosen pembimbing I dan II. Konsultasi ini penting karena mendiskusikan tentang permasalahan yang dikaji dan juga pemberian saran dan masukan dari dosen pembimbing mengenai konsep – konsep yang akan dijelaskan, sumber – sumber apa saja yang harus didapatkan penulis, tatacara penyusunan laporan penelitian dan juga rumusan masalah di dalam penelitian apakah sesuai dengan tema yang dikaji atau tidak. Berdasarkan pada konsultasi yang dilakukan oleh

penulis dengan dosen pembimbing I dan II, penulis mendapatkan arahan dan masukan yang membantu di dalam menyelesaikan penelitian serta penyusunan skripsi ini.

Penulis melakukan konsultasi bimbingan dengan Pembimbing II pada tanggal 25 September 2012, setelah sebelumnya penulis sudah menyerahkan *draft* bimbingan untuk bab I, II, dan III. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut penulis mendapatkan catatan dari Pembimbing II untuk memperbaiki beberapa bagian – bagian tertentu yang sudah diberikan penjelasan khusus dan konten skripsi yang perlu ditambahkan lebih banyak lagi. Penulis melakukan konsultasi lanjutan tanggal 18 Oktober 2012, dan hasil konsultasi tersebut bahwa *draft* yang sudah diserahkan satu minggu sebelumnya dinilai sudah cukup komprehensif, tetapi masih perlu ada beberapa bagian yang harus diperbaiki oleh penulis.

Ketika konsultasi tanggal 19 Oktober 2012 yang dilakukan oleh penulis dengan Pembimbing I, terdapat beberapa perbaikan yang harus dilakukan pada bab I Pendahuluan. Bagian yang harus diperbaiki tersebut adalah latar belakang masalah dan bagian rumusan masalah. Selanjutnya adalah bagian bab II Tinjauan Pustaka, yaitu sumber – sumber yang harus dicantumkan oleh penulis merupakan sumber mengenai *apartheid* dan terjadi perubahan pada penjelasan mengenai konsep *kebijakan* yang dirubah menjadi penjelasan mengenai konsep *diskriminasi rasial*. Bagian terakhir yang harus diperbaiki penulis adalah bab III Metodologi Penelitian, yaitu pada sub-bab *Penafsiran dan Penjelasan Fakta* di mana penulis harus memberikan penafsiran mengenai hal – hal yang bersifat faktual yang terjadi di Republik Afrika Selatan yang sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

Pada tahapan bimbingan selanjutnya, penulis melakukan revisi pada bagian latar belakang masalah mengenai penambahan keterangan tahun dan menghapuskan biografi tokoh. Pada bagian rumusan masalah penulis mengganti rumusan masalah pertama menjadi bagaimana kondisi sosial politik di Afrika Selatan pada masa pemerintahan Pieter Williem Botha tahun 1984 – 1989. Penulis juga menambahkan penjelesan mengenai konsep *diskriminasi rasial*.

Setelah melakukan penambahan penjelasan mengenai konsep *diskriminasi rasial*, penulis kembali melakukan bimbingan pada tanggal 4 Desember 2012. Hasil bimbingan kali ini adalah penulis masih harus menambahkan penjelasan mengenai konsep *diskriminasi rasial* sebanyak 2 halaman atau lebih. Selain itu penulis harus menambahkan teori yang digunakan pada saat menyusun skripsi ini, jangan hanya terpaku pada teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf. Penulis juga disarankan untuk menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser dan juga pemikiran Karl Marx. Pada bagian bab 3 pembimbing sudah merasa cukup bagus. Kemudian pembimbing menyarankan setelah selesai menambahkan penjelasan – penjelasan dari beliau, penulis bisa mengerjakan bab selanjutnya yaitu bab 4 dan bab 5.

3.2. Pelaksanaan Penelitian

3.2.1. Pencarian dan Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Tahapan ini merupakan tahap awal penelitian bagi penulis. Penulis mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam mengkaji permasalahan penelitian di dalam skripsi ini. Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian maka data yang diperlukan adalah data mengenai kondisi sosial dan politik di Republik Afrika Selatan pada masa pemerintahan sebelum dan sesudah Frederik Willem de Klerk berkuasa, kebijakan *apartheid*, bagaimana realisasi kebijakan tersebut dan dampak – dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Di dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menganalisis tahapan perubahan undang – undang yang berlaku dan bentuk realisasinya di Republik Afrika Selatan sebelum dan sesudah Frederik Willem de Klerk berkuasa agar bisa didapatkan gambaran perbandingan dan proses perubahan undang – undang tersebut. Hal tersebut bisa penulis dapatkan dari studi literatur melalui jurnal – jurnal dan buku yang telah diperoleh penulis, baik koleksi pribadi maupun hasil pencarian dari berbagai tempat dan *browsing* internet. Penulis melakukan kunjungan ke beberapa perpustakaan, di antaranya Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) serta Museum Konferensi Asia Afrika, dan meminta

bantuan kepada teman yang berada di luar Bandung untuk mendapatkan sumber yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kunjungan pertama ke Museum Konferensi Asia Afrika, penulis tidak mendapatkan satu pun sumber dikarenakan komputer di dalam museum mengalami gangguan. Lalu kunjungan kedua yang dilakukan oleh penulis, didapatkan sumber buku yang berjudul “*Langkah Menuju Kebebasan : Surat – Surat dari Bawah Tanah*” karya Nelson Mandela. Ketika melakukan kunjungan ke Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), penulis menemukan buku yang berjudul “*Teori – Teori Sosiologi*” karya Prof. Dr. Nasrullah Naszir, M. S. , buku “*Teori Sosiologi Modern*” karya Bernard Raho, SVD, buku “*Modern Africa*” yang diedit dan dikomentari oleh Peter J. M. McEwan dan Robert B. Sutcliffe. Selain itu, penulis menggunakan buku – buku koleksi pribadi, di antaranya buku *Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika* karya Dr. Abdul Hadi Adnan, *Sejarah Afrika* karya Darsiti Suratman, *Afrika Selatan : Catatan Sebuah Perjalanan di Bumi Nelson Mandela* karya T. Hasan Basri, *Metode Sejarah* karya Helius Sjamsudin, dan *Kewarganegaraan Multikultural* karya Will Kymlicka.

Penulis berupaya mencari sumber jurnal dengan meminta bantuan kepada teman penulis yang berada di luar kota Bandung. Penulis berhasil mendapatkan duplikasi jurnal yang berjudul “*Indicators of political liberty, property rights and political instability in South Africa: 1935–97. International Review of Law and Economics.*” karya J. T. Fedderkea dan kawan – kawan. Selain jurnal, teman penulis juga memberikan pinjaman buku yang berjudul “*Art and The End of Apartheid*” karya John Peffer, “*Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*” karya Edi Suharto. Selain sumber jurnal dan buku, penulis mendapatkan duplikat artikel dari surat kabar Pikiran Rakyat yang berjudul “*Pemerintahan Transisi di Afsel Tidak Mudah : Pertikaian Sesama Kulit Hitam Masih Jadi Kendala*” edisi Selasa, 3 Mei 1994 dan “*Kerusuhan Politik Tewaskan 20 Orang*” edisi 11 Juli 1990.

Selain sumber – sumber yang sudah dikemukakan tersebut penulis meminjam koleksi teman yaitu buku “*7 Tokoh Kunci Nazi : Penentu Sejarah*

Jerman dan Penyebab Perang Dunia II” karya Luger Ballack yang terbit tahun 2007. Penulis pun mendapatkan duplikat buku “*Selected Writings in Sociology and Social Philosophy*” karya Tom Bottmore dkk. Ketika menjelaskan teori Coser, penulis menggunakan sumber buku yang berjudul “*George Simmel*” dan “*The Function of Social Conflict*” serta “*Continuities in the Study of Social Conflict*” karya Lewis Coser.

3.2.2. Kritik dan Analisis Sumber

Kritik dan analisis sumber diperlukan agar penulis bisa mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam skripsi ini. Pada metode historis dikenal dengan melakukan kritik eksternal dan internal (Sjamsudin, 2007: 132). Helius Sjamsudin mengatakan bahwa “*kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek – aspek “luar” dari sumber sejarah.*”

Fungsi dari kritik eksternal memeriksa keaslian dan integritas sumber sejarah yang diperoleh, sedangkan kritik internal adalah kritik yang lebih ditekankan kepada aspek “dalam” yaitu isi sumber (Sjamsudin, 2007: 143). Kritik eksternal dan internal ini penulis lakukan terhadap buku, jurnal, serta artikel yang penulis peroleh dari surat kabar dan majalah.

Pada skripsi ini, penulis tidak melakukan kritik eksternal secara ketat, karena penulis tidak mengkaji arsip-arsip (sumber primer). Ketika melakukan kritik eksternal, penulis hanya melihat tahun penerbitan pada sumber buku yang diperoleh penulis, yaitu mengambil sumber buku dengan tahun penerbitan yang lebih baru (kontemporer).

Penulis juga melakukan kritik internal pada buku “*Art and The End of Apartheid,*” karya John Peffer menjelaskan bahwa *apartheid*:

“...the removal of African families from their farm and placing them in “native reserves” ; the segregation of living, working, and recreational space within cities; the classifications of Africans as “temporary sojourners” within cities; and a range of laws restricting interactions between the races, including the separations of public services and amenities (petty apartheid).”

Pada intinya bahwa bentuk kebijakan *apartheid* yang dibuat oleh pemerintahan Republik Afrika Selatan adalah dengan mengusir kelompok mayoritas pribumi kulit hitam dari tempat tinggal mereka, memisahkan kehidupan mereka dari kelompok minoritas kulit putih, tempat untuk berekreasi, hukum yang membatasi interaksi antara ras, termasuk pemisahan pelayanan dan berbagai fasilitas umum lainnya.

Hal – hal mengenai pemisahan ini juga terdapat pada buku “*Kewargaan Multikultural*” karya Will Kimlycka. Kimlycka (2011: 33) menjelaskan bahwa :

“Para Afrikaner di Afrika Selatan juga mempunyai konsep kebangsaan berbasis keturunan. Mereka berupaya untuk melarang perkawinan campur antar ras dan mengucilkan anak hasil perkawinan itu (Coloureds) dari lingkungan tempat tinggal mereka dan organisasi, bahkan walau bahasa dan kebudayaan para Coloureds itu secara esensial identik dengan bahasa dan budaya mereka (pembatasan dalam hal tempat tinggal, yang menurut dugaan bertujuan melindungi kebudayaan Afrikaner, tidak pernah diberlakukan bagi orang – orang kulit putih berbahasa Inggris yang tidak dapat sama sekali berbahasa Afrikaner).”

Berdasarkan pada kedua kutipan tersebut, terlihat pemisahan yang dimaksud, yaitu fasilitas dan layanan umum, tempat rekreasi, lingkungan tempat tinggal dan organisasi, bahkan sampai pada yang dipergunakan. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu memasukkan kedua kutipan tersebut ke dalam skripsi ini.

Penjelasan lainnya mengenai kebijakan *apartheid*, sebagai bentuk penguatan penjelasan penulis mengutip penjelasan yang terdapat pada buku “*Modern Africa*”, Schreiner (1965: 229) mengungkapkan bahwa :

“There are certain basic facts that stand out in the South African scene today. Non – Whites outnumber Whites by more than 4 to 1 and increase more rapidly. Apart from a small group representation of Coloured persons in the Cape Province, the non – Whites are voteless and all political power is by law concentrated in the hands of the Whites. The racial groups, though predominating respectively in different areas, are thoroughly mixed up throughout the country, both territorially and economically.”

Kutipan tersebut menjelaskan terdapat fakta dasar bahwa di Afrika Selatan yaitu terjadi peningkatan jumlah kulit berwarna dengan perbandingan 4:1 lebih banyak daripada kelompok kulit putih. Walaupun sudah dibentuk perwakilan untuk kulit berwarna di Provinsi Cape, tetapi perwakilan tersebut tidak diberikan

hak untuk dipilih dalam perpolitikan. Hal tersebut dikarenakan semua konsentrasi hukum berada di tangan pemerintahan yang dipegang oleh kelompok kulit putih.

Kritik internal lainnya yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai hal – hal faktual yang terjadi di Republik Afrika Selatan seputar kebijakan *apartheid*. Pada artikel surat kabar Pikiran Rakyat yang berjudul “*Kerusuhan Politik Tewaskan 20 Orang*” dikemukakan bahwa di daerah Sebokeng, sebelah selatan Johannesburg, telah terjadi kerusuhan politik yang menyebabkan jatuh korban tewas 20 orang. Kejadian tersebut mengancam terlaksananya perundingan antara pemerintahan Republik Afrika Selatan dengan para pemimpin anti-*apartheid*. Pihak polisi menilai bahwa unjuk rasa yang dilakukan oleh para aktivis anti-*apartheid* tersebut melanggar UU keadaan darurat yang telah diberlakukan di Republik Afrika Selatan yang telah berusia tiga tahun. Penjelasan mengenai kerusuhan dan pemberlakuan UU keadaan darurat tersebut didukung dengan penjelasan pada buku “*Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika*” karya Abdul Hadi Adnan yang menjelaskan bahwa :

Pengaturan kependudukan dan pembagian wilayah yang sangat merugikan kelompok pribumi kulit hitam menyulut masalah yang besar di Republik Afrika Selatan. Banyak terjadi kekacauan di berbagai tempat, seperti peristiwa Soweto dan Sharpville. Dikarenakan hal tersebut, maka pemerintahan Republik Afrika Selatan memberlakukan keadaan darurat (Adnan, 2008: 89).

Menurut pandangan penulis informasi yang bersifat faktual tersebut bisa dijadikan sebagai penguat bukti bahwa telah terjadi kerusuhan yang besar sehingga diberlakukannya UU keadaan darurat di Republik Afrika Selatan pada masa pemerintahan Frederik Willem de Klerk yang berlangsung dari tahun 1989 – 1994.

3.2.3 Penafsiran dan Penjelasan Fakta

Ketika tahapan heuristik dan kritik telah dilalui oleh penulis, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan penafsiran dan penjelasan terhadap fakta – fakta yang penulis peroleh. Pada tahap penafsiran, penulis mencoba merangkaikan setiap fakta – fakta dan informasi yang diperoleh penulis sebelumnya menjadi satu

– kesatuan yang utuh, juga berusaha menghilangkan unsur subjektivitas dan berusaha seobjektif mungkin menjelaskan fakta dan informasi. Berdasarkan pada sumber – sumber yang sudah penulis peroleh, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pada intinya merupakan program yang dibuat oleh pemerintahan untuk merealisasikan tujuan dari negara bersangkutan. Kebijakan yang dibuat atau diambil oleh pemerintahan dalam suatu negara biasanya berkaitan erat dengan kegiatan politik dan sosial, serta kebijakan yang diambil ini bisa menimbulkan dampak pada kehidupan masyarakatnya.

Kebijakan politik merupakan sistem konsep atau aturan resmi yang dibuat oleh pemerintahan di dalam suatu negara yang diadakan sebagai landasan atau pedoman politik negara, misalkan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Sedangkan kebijakan sosial adalah sistem konsep atau aturan resmi yang dibuat pemerintah sebagai landasan atau pedoman dalam pemeliharaan, perubahan, dan penciptaan kondisi kehidupan yang kondusif untuk kesejahteraan manusia. Contoh dari jenis kebijakan politik dan sosial ini adalah pemberlakuan kebijakan *apartheid* di Republik Afrika Selatan. *Apartheid* merupakan suatu kebijakan politik dan sosial yang ditetapkan oleh pemerintahan Republik Afrika Selatan pada masa Hendrik Verwoerd pada tahun 1958, di mana inti dari kebijakan tersebut adalah pemisahan dan bersifat diskriminasi.

Konsep *diskriminasi* mengaju kepada suatu ketidakadilan dan pembatasan, pelecehan, atau pengucilan didasarkan pada perbedaan manusia menurut agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berdampak pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Wujud dari konsep *diskriminasi* berupa perlakuan yang berbeda yang didasarkan pada kelompok, dapat juga dilakukan dengan perilaku menyerang atau menyakiti anggota kelompok lain. Diskriminasi mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat dan tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

Pemberlakuan kebijakan yang dinilai berbagai pihak sebagai kebijakan rasialis (bersifat diskriminasi rasial) ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di Republik Afrika Selatan, terutama dalam kondisi sosial dan politik. Kondisi sosial dan politik di Republik Afrika Selatan memang bergejolak dari awal pemerintahan kulit putih berkuasa. Konflik kepentingan yang menjadi latar belakang dalam pertikaian antara kelompok minoritas kulit putih dengan mayoritas kulit hitam. Kelompok mayoritas kulit hitam menginginkan persamaan dengan kelompok minoritas kulit putih dalam segala aspek kehidupan.

Keinginan untuk mendapatkan persamaan ini dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan kelompok minoritas kulit putih yang berkuasa. Benturan – benturan kepentingan ini pada akhirnya mendatangkan kekacauan – kekacauan di Republik Afrika Selatan dan memerlukan suatu rekonsiliasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Contoh dari kekacauan yang terjadi tersebut adalah kerusuhan politik di Sebokeng, daerah sebelah selatan dari Johannesburg. Kerusuhan ini terjadi karena polisi yang hadir pada unjuk rasa yang dilakukan oleh para aktivis *apartheid* tersebut menembaki mereka dan menyebabkan korban tewas berjumlah 20 orang. Pihak polisi menilai bahwa para pengunjung rasa tersebut telah melanggar UU keadaan darurat yang telah berlaku selama tiga tahun.

Kerusuhan yang terjadi di daerah Sebokeng tersebut mengancam terlaksananya perundingan yang telah direncanakan antara pemerintahan dengan para pemimpin gerakan anti-*apartheid* yang dijadwalkan bulan depan. Tetapi konflik tidak hanya terjadi antara kelompok minoritas kulit putih dengan kelompok mayoritas kulit hitam, melainkan juga terjadi antara kelompok mayoritas kulit hitam dengan kelompok mayoritas kulit hitam lainnya dalam memperebutkan kekuasaan politik ketika akan dilaksanakannya pemilihan umum multiras pertama di Republik Afrika Selatan.

Ketika mengkaji dan menganalisis permasalahan pada skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan teori sosial, yaitu teori konflik Ralf Dahrendorf. Teori konflik Ralf Dahrendorf ini menyatakan bahwa pertentangan kelompok sebagai satu bentuk konflik dan sebagai sumber perubahan sosial. Kelompok sosial

tersebut yaitu, mereka yang berkuasa dan yang dikuasai (dalam hal ini pemerintahan kulit putih Republik Afrika Selatan dengan masyarakat pribumi kulit hitam).

Selain teori Ralf Dahrendorf, penulis juga menggunakan dua teori lainnya, yaitu teori konflik Lewis A. Coser dan Pemikiran Karl Marx yang menjadi dasar bagi terbentuknya teori konflik. Teori Lewis A. Coser ini mengemukakan bahwa konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Kemudian pemikiran Karl Marx mengenai teori pertentangan antar kelas yang dielaborasi oleh Dahrendorf dan Coser ini menjadi dasar dari teori – teori konflik yang sudah penulis jelaskan sebelumnya. Karl Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada abad ke- 19 di Eropa di mana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Pada kasus konflik kebijakan *apartheid* di Afrika Selatan, penulis menempatkan kelompok minoritas kulit putih sebagai kaum borjuis sedangkan kelompok mayoritas kulit hitam sebagai kaum proletar.

3.2.4 Historiografi dan Laporan Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif – analitik yaitu mengungkapkan kondisi sosial dan politik di Republik Afrika Selatan sebelum dan sesudah pemerintahan Frederik Willem de Klerk berkuasa, kejadian – kejadian pada masyarakat Republik Afrika Selatan, terutama masyarakat pribumi kulit hitam, realisasi dan akibat kebijakan *apartheid*. Sistematika penyusunan skripsi ini untuk kebutuhan studi tingkat sarjana, sehingga penulis sesuaikan dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Berdasarkan petunjuk yang penulis peroleh dari pedoman penyusunan karya tulis ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Bandung, maka sistematika skripsi ini terdiri dari lima bagian yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, kajian teori dan pembahasan, serta kesimpulan.

